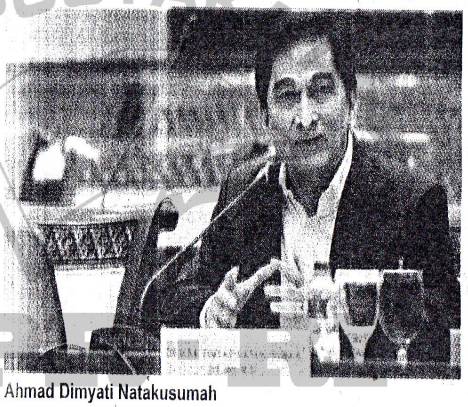
KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : BURT janji deteksi dan lakukan evaluasi rutin, Rumah aspirasi DPR wajib pakai papan nama & struktur
Tanggal : Minggu, 01 Maret 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

BURT Janji Deteksi Dan Lakukan Evaluasi Rutin

Rumah Aspirasi DPR Wajib Pakai Papan Nama & Struktur

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR berjanji melakukan evaluasi secara rutin pelaksanaan program rumah aspirasi anggota Dewan. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir, karena punya kesempatan mengawasi DPR.



Ahmad Dimyati Natakusumah

WAKIL Ketua BURT DPR Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan, penyaluran anggaran pembangunan rumah aspirasi akan transparan, sehingga anggota Dewan tidak dapat menyalahgunakan dana tersebut.

Dimyati menjelaskan, BURT akan meminta bukti pertanggungjawaban kepada anggota Dewan yang telah membangun rumah aspirasi. Anggaran tidak akan cair jika anggota Dewan belum memiliki bukti fisik penyewaan rumah tersebut.

"Tidak ada pertanggungjawaban, ya dana tidak bisa digunakan, tidak akan cair itu. Jadi, dia sewa rumah tapi rumahnya enggak ada, maka itu tidak bisa. Itu temuan pelanggaran. Selain itu, kita juga akan evaluasi dan akan kami deteksi. Kami cek rumah-rumah aspirasi di daerah-daerah. Kami juga akan tanya mana aspirasinya, mana papan namanya, strukturnya seperti apa," kata Dimyati.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu optimistis, pengadaan rumah aspirasi akan memberikan manfaat bagi rakyat, mempermudah konstituen menyampaikan aspirasi kepada anggota Dewan. Masyarakat bebas melaporkan aspirasinya.

Senada, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Didik Mukrianto, berpendapat keberadaan rumah aspirasi di daerah pemilihan (dapil) anggota DPR sangat dibutuhkan masyarakat. Pasalnya, anggota Dewan tak bisa terus-menurus berada di dapil untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Sejauh ini, pola hubungan dan komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat berlangsung secara tidak langsung. Publik kekurangan media untuk berinteraksi dengan anggota Dewan. Program rumah aspirasi merupakan terobosan," ujar Didik saat dikontak *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Ia menyadari kritik yang disampaikan sejumlah kalangan terkait program tersebut. Menurutnya, anggaran dan realisasi pelaksanaan program rumah aspirasi tidak perlu dipersoalkan, karena publik punya kesempatan mengawasi.

Sebelumnya, DPR menambah anggaran untuk perbaikan kinerjanya sebesar Rp 1,6 triliun pada APBN Perubahan 2015. Dari jumlah Rp 1 triliun akan dipakai untuk membuat rumah aspirasi bagi 560 anggota DPR periode kini. Sisa Rp 600 miliar dikelola untuk membiayai program-program Sekretariat DPR.

LSM Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menentangnya. Menurut LSM yang konsen pada perbaikan kinerja lembaga legislatif itu, seharusnya pembangunan dan biaya operasional rumah aspirasi menggunakan dana pribadi anggota Dewan.

Formappi mencontohkan, ada 28 anggota DPR periode 2009-2014 memiliki dan mengelola rumah aspirasi atas inisiatif sendiri dan membiayai operasionalnya dari dana pribadi, gaji maupun tunjangan sebagai anggota DPR.

"Mereka bisa, pasti anggota DPR lain juga bisa biayai sendiri. Tidak perlu memboroskan uang negara," kata Peneliti Senior Formappi, M Djadijono.

Formappi mengecam alokasi anggaran rumah aspirasi sebagai pemborosan uang negara. Karena dana Rp 1 triliun untuk membangun rumah aspirasi itu dibagi kepada 560 anggota DPR, maka setiap anggota akan mendapatkan sekitar Rp 1,78 miliar per tahun, atau Rp 148,8 juta per bulan. ■ ONI